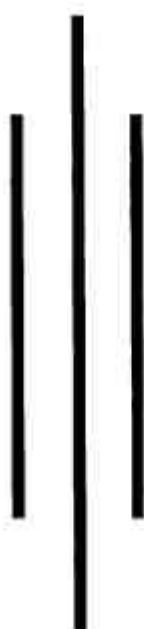


**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
( RTP )  
STRATEGIS**

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023**



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**  
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Telp. (0291) 431328  
KUDUS 59313

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Dasar hukum .....	2
1.3. Maksud dan tujuan .....	3
1.4. Manfaat .....	3
1.5. Ruang lingkup .....	3
BAB II. SEKILAS TENTANG SPIP .....	5
2.1. Pengertian SPIP .....	5
2.2. Tujuan SPIP .....	5
2.3. Unsur- unsur SPIP .....	6
2.4. Pernyataan tanggung jawab .....	8
BAB III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN .....	10
3.1. Lingkungan pengendalian yang diharapkan .....	10
3.2. Kondisi lingkungan pengendalian saat ini .....	10
3.3. Rencana penguatan lingkungan pengendalian .....	12
BAB IV. PENILAIAN RISIKO .....	14
4.1. Penetapan Tujuan .....	14
4.2. Identifikasi Risiko .....	15
4.3. Analisis Risiko .....	16
BAB V. KEGIATAN PENGENDALIAN .....	22
BAB VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....	23
BAB VII. PEMANTAUAN .....	24
BAB VIII. PENUTUP .....	25
LAMPIRAN .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern pada BPPKAD.....	11
Tabel 2.	Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian.....	12
Tabel 3.	Penetapan Konteks Risiko Strategis (BPPKAD).....	15
Tabel 4.	Identifikasi Risiko Strategis.....	16
Tabel 5.	Daftar Analisis Risiko Strategis .....	17
Tabel 6.	Penentuan Risiko Strategis Prioritas ...(nama OPD).....	18

## PENGANTAR

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Sasaran Strategis BPPKAD Kabupaten Kudus berisikan proses pengelolaan risiko sasaran strategis yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya BPPKAD Kabupaten Kudus

Kudus, Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



## DAFTAR LAMPIRAN

- Form 1A. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern/ CEE
- Form 1B. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
- Form 1C. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
- Form 2B. Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD
- Form 3B. Identifikasi Risiko Strategis OPD
- Form 4. Hasil Analisis Risiko
- Form 5. Daftar Risiko Prioritas
- Form 6. Penilaian atas Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian
- Form 7. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
- Form 8. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun
- Form 9. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

BPPKAD Kabupaten Kudus sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Kabupaten Kudus.

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. BPPKAD Kabupaten Kudus sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut BPPKAD telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah

penyelenggaraan SPIP dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. BPPKAD Kabupaten Kudus memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan BPPKAD. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RTP pada BPPKAD adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
7. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di BPPKAD Kabupaten Kudus untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

### **1.4. Manfaat**

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan BPPKAD antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

### **1.5. Ruang Lingkup**

RTP BPPKAD merupakan pengendalian atas sasaran strategis dan operasional/ kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat BPPKAD. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan / tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan BPPKAD. Dalam dokumen ini dilakukan pengendalian atas sasaran strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD tahun 2024 - 2026.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis yang akan dicapai BPPKAD adalah



sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
2. Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPPKAD

Pengelolaan risiko strategis BPPKAD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra). Pengelolaan risiko strategis dilakukan oleh Kepala BPPKAD bersama jajaran manajemennya.

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami BPPKAD sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko BPPKAD dilakukan atas tujuan strategis dan tujuan pada tingkatan kegiatannya/ operasional. Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

##### **a. Pengembangan budaya sadar risiko**

Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi baik di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah maupun dilakukan di Perangkat Daerah. Selain itu juga melakukan Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

##### **b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko**

Unit Pemilik Risiko BPPKAD memiliki tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses

pengelolaan risiko. BPPKAD telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang bertugas membantu Kepala BPPKAD dalam penyelenggaraan SPIP.

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode lima tahunan dengan dilakukan pemantauan secara periodik yaitu setiap tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

### 2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah :

- 1) lingkungan pengendalian,
- 2) penilaian risiko,
- 3) kegiatan pengendalian,
- 4) informasi dan komunikasi,
- 5) pemantauan.

Adapun penyelenggaraan SPIP pada BPPKAD berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan

pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada BPPKAD sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada sasaran strategis/ kegiatan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan BPPKAD dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja,

penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPPKAD juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi BPPKAD memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/ unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja BPPKAD. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
  - Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi BPPKAD serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
  - Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh BPPKAD terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

#### **2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna

Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen RTP.

## BAB III

### LINGKUNGAN PENGENDALIAN

#### 3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPIP. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan pengendalian BPPKAD bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### 3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi Lingkungan Pengendalian BPPKAD dinilai berdasarkan hasil survei kepada 25% Pegawai di lingkup BPPKAD (sejumlah 21 orang) dan berdasarkan revidu dokumen yang dilakukan APIP. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE Survei) ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Metode CEE) yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Berdasarkan survei CEE pada Form I.A menunjukkan bahwa sub unsur dari kondisi lingkungan pengendalian memiliki simpulan memadai dan kurang memadai.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian juga dilakukan berdasarkan revidu dokumen. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa Laporan Hasil Revidu, Laporan Hasil pemeriksaan dan dokumen lainnya. Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern sebagaimana disajikan pada Form 1.B terdapat 1 sub unsur yang kurang memadai yaitu Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan namun belum terisi sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil revidu dokumen dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada BPPKAD dengan menggunakan Kertas Kerja Form 1.C

**Tabel 1. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern pada BPKAD**

No	Sub Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Seha1 tentang Pembinaan SOM	Memadai
7.	Perwujudan Peran Pengelola Keuangan	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan pada sub unsur Komitmen terhadap Kompetensi.



### 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu komitmen terhadap kompetensi. Kompetensi seorang pegawai sangat berpengaruh terhadap penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pegawai dalam instansi. Ketersediaan SDM untuk melaksanakan tujuan organisasi secara kuantitatif dan kualitatif masih kurang. Hal ini disebabkan banyak pegawai BPPKAD yang memasuki purna tugas/pensiun dan tidak ada penambahan ASN. Dari sisi kualitas/kompetensi BPPKAD masih banyak membutuhkan tenaga komputer, akuntan, penilai aset, penilai pajak dalam pelaksanaan tugas. Adapun rencana penguatan pengendalian tersebut sebagai berikut :

**Tabel 2. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian**

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaa
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Komitmen terhadap kompetensi</b>		
	Pengiriman peserta Bintek/Pelatihan	Sekretaris	Januari 2023
	Pengusulan Diklat Teknis ke BKPSDM	Sekretaris	Januari 2023
	Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (eSKP)	Sekretaris	Maret 2023
	Pelatihan Pengelolaan Arsip Berbasis Elektronik (Aplikasi Srikandi)	Sekretaris	Mei 2023
<b>2</b>	<b>Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait</b>		
	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan KUA – PPAS dan APBD	Kabid Anggaran	Triwulan III & IV
	Koordinasi dan konsolidasi laporan keuangan OPD, BLUD, dan LKPD	Kabid Akuntansi	Triwulan I – IV
	Sosialisasi Sistem dan Prosedur APBD	Kabid Perbendaharaan	Triwulan III
	Sosialisasi Barang Milik Daerah (BMD)	Kabid Aset	Triwulan III

	Koordinasi dengan kepala BPN Kabupaten Kudus terkait pensertifikatan tanah pemda	Kabid Aset	Triwulan I - IV
	Pelatihan Aplikasi SSH	Kabid Aset	Triwulan II
	Koordinasi dan evaluasi APBD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Kabid Anggaran	Triwulan III & IV
	Sosialisasi Pajak Daerah	Kabid Pendapatan	Triwulan III

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 1.A : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*

*Form 1.B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di BPKAD*

*Form 1.C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern BPKAD*

## BAB IV PENILAIAN RISIKO

### 4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2022, rencana tindak pengendalian yang disusun BPPKAD diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
2. Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko perangkat daerah dilakukan atas tujuan (strategis) PD dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Pengelolaan risiko strategis PD
- b. Pengelolaan risiko operasional/ kegiatan PD

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Kudus Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah "Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas, dan Sejahtera", Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kudus yang Berkualitas, Kreatif, Inovatif dengan Memanfaatkan Teknologi dan Multimedia;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk peningkatan pelayanan publik;
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab BPPKAD.

BPPKAD mendukung misi ke-2. Bupati Kudus Tahun 2018 - 2023 yaitu "Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Peningkatan Pelayanan Publik".

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko BPPKAD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko Strategis BPPKAD**

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah 2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	IKU Strategis: 1. Rasio kemandirian keuangan daerah 2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 3. Persentase Peningkatan PAD pertahun 4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 5. Nilai Evaluasi SAKIP

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.B : Penetapan konteks risiko strategis BPPKAD*

#### 4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. Identifikasi Risiko Strategis BPPKAD**

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
<b>I. Risiko Strategis BPPKAD</b>			
1	Target Pendapatan Aksi Daerah (PAD) tidak tercapai	1. Penetapan target PAD tidak melalui kajian yang valid 2. Wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak 3. Pelayanan terhadap wajib pajak belum optimal	Target PAD tidak optimal
2	Pemanfaatan dan Pendayagunaan aset kurang optimal	1. Pengamanan BMD kurang optimal 2. Adanya klaim atas aset dari masyarakat/instansi pemerintah lainnya. 3. Kurangnya informasi tentang pemanfaatan aset	1. Pemkab kehilangan aset daerah 2. PAD tidak optimal.
3	Keterlambatan penetapan APBD	Dinamika Regulasi Politik dan kurangnya komitmen kepala OPD dan pimpinan DPRD	1. Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan penyaluran DAU 2. Keterlambatan pelaksanaan pembangunan

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 3b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis .*

### 2.3. Analisis Risiko

#### 4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan

melalui survey terhadap ASN di lingkungan BPPKAD. Dari hasil identifikasi risiko diperoleh informasi sebagai berikut: Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Strategis BPPKAD

**Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Strategis**

No	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
<b>I. Risiko Strategis</b>					
1	Target Pendapatan Aksi Daerah (PAD) tidak tercapai	4	3	12	Tinggi
2	Pemanfaatan dan Pendayagunaan aset kurang optimal	4	3	12	Tinggi
3	Keterlambatan Penetapan APBD	4	3	12	Tinggi

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.....

*Form 4. : Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Strategis.*

#### 4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level "Sangat Tinggi", "Tinggi" dan "Sedang" dengan nilai skala dampak 4. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, BPPKAD membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya, menghasilkan skala risiko sebagai berikut:

**Tabel 6. Penentuan Risiko Strategis Prioritas**

No	Resiko Prioritas	Nilai Resiko
1.	Target Pendapatan Aksi Daerah (PAD) tidak tercapai	12
2.	Pemanfaatan dan pendayagunaan aset kurang optimal	12
3.	Keterlambatan Penetapan APBD	12

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

**4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)**

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

**4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, Form 6 (kolom c– e).**

**4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:**

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) PD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Berdasarkan risiko prioritas tersebut BPPKAD membuat rencana tindak pengendalian terhadap risiko strategis PD sebagai berikut :



1. Melakukan kajian potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, sosialisasi / himbauan / teguran dan tagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
2. Koordinasi dan komunikasi yang intensif kepada pimpinan OPD dan pimpinan DPRD
3. Melakukan monitoring dan evaluasi, sosialisasi, penyelesaian sengketa tanah dengan masyarakat / gugatan pengadilan, pemasangan papan tanda kepemilikan / pagar keliling tanah pemda

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom d – h)*.

#### 4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

#### 4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi & Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom b – g)*.

#### 4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko, & RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom b – e)*.

## BAB V

### KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian  
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, BPPKAD telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

2. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Nomor; 900/125/2017 tentang Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan BPPKAD Kabupaten Kudus.

## BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, BPPKAD perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak- pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala PD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

BPPKAD merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Melakukan kajian potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, sosialisasi / himbuan / teguran dan tagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
2. Koordinasi dan komunikasi yang intensif kepada pimpinan OPD dan pimpinan DPRD
3. Melakukan monitoring dan evaluasi, sosialisasi, penyelesaian sengketa tanah dengan masyarakat / gugatan pengadilan, pemasangan papan tanda kepemilikan / pagar keliling tanah pemda

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom b – f)*.

## BAB VII PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan pada triwulan II, Triwulan III, IV dan Triwulan I tahun 2023 sesuai Lampiran I, *Form 9 (kolom e dan f)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d-g, dan kolom j-k)*.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat operasional BPPKAD Kabupaten Kudus merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen RTP berisi gambaran efektivitas, struktur, kebijakan dan prosedur organisasi dalam mengendalikan resiko. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Kudus, Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

  
EKODALMARTONO, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681004 199303 1 006